

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KOORDINASI INDUSTRI,
KETENAGAKERJAAN, DAN PARIWISATA**

NOTA DINAS

NOMOR : AK.03.01/348/SET.M.EKON.1/07/2026

Yth : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan
Pariwisata
Hal : Penyampaian Narasi Capaian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang
Koordinasi Industri Ketenagakerjaan dan Pariwisata TW I dan II Tahun
2026
Tanggal : 17 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor AK.03.01/170/SET.M.EKON.1/06/2026 hal Permintaan Penyusunan Narasi Kinerja Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan Laporan Capaian Kinerja (LAPKIN) Triwulan I dan II Tahun 2026 Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Penyusunan laporan ini merupakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014, dan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada Triwulan I dan II Tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi
Industri, Ketenagakerjaan,
dan Pariwisata,



Nuryani Yunus
NIP 197009091996032001

Tembusan Yth.:
Plt. Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata (sebagai
laporan)

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Triwulan II Tahun 2026

Kinerja Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan II 2026	Realisasi Triwulan II 2026	Capaian (%)
I	Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang Baik					
1.1	Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	92 %	46 %	46 %	100%
1.2	Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	50 %	50%	100 %
1.3	Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	50 %	50 %	100 %
1.4	Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	50 %	50 %	100 %
1.5	Persentase Penyelesaian Isu-isu Strategis yang diberikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata	Persentase (%)	100 %	50 %	50 %	100 %
1.6	Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	75 %	50 %	50 %	100 %
1.7	Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,53	117 %

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang Baik

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata yang baik ditunjukkan oleh pencapaian tujuh indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
2. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
3. Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
4. Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy;
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu agenda nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Bagi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, keberhasilan implementasi reformasi birokrasi menjadi instrumen penting dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata.

Tingkat implementasi reformasi birokrasi diukur melalui pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi yang sesuai standar, yang mencakup aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2026 ditetapkan sebesar **92%**. Pengukuran dilakukan dengan menilai kelengkapan dan kualitas dokumen pendukung, ketepatan waktu penyampaian, serta kesesuaian dengan format standar dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 46% dari target sebesar 46% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi	Persentase (%)	46%	46%	100 %

Deputi				
Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata				

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Mendukung Pemenuhan bukti dukung rencana aksi RB General dan Tematik	Terlaksana	Telah ditindak lanjuti Nota Dinas Nomor: RB.01/133/SET.M.EKON.2/06/2026 perihal Penyampaian Panduan Pengisian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) General dan RB Tematik
2.	Melakukan monitoring dan Evaluasi Implementasi Renaksi TW I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Akselerasi Peningkatan Nilai SAKIP melalui Penguatan Akuntabilitas Laporan Kinerja dan Pemanfaatannya dalam Mendorong Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2026 pada 29 April 2026 berdasarkan UND Nomor: PW.04.01/209/D.V.M.EKON.1/04/2026 Penyampaian Nota Dinas Nomor: AK.02.02/265/D.V.EKON.1/05/2026 perihal Laporan Hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Deputi V

3.	Penyusunan Laporan Kinerja dan pelaksanaan Anggaran Triwulan I	Terlaksana	Nota Dinas Nomor: AK.03/226/D.V.M.EKON.1/04/2026 Perihal Permintaan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026
4.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana	Pada Triwulan I tahun 2026, Pemanfaatan Aplikasi Srikandi di lingkungan Deputi V telah dioptimalkan untuk Mempercepat Proses Korespondensi antar Instansi serta Memperkuat Tata Kelola Digitalisasi Arsip yang Lebih Sistematis dan Akuntabel. Telah ditindak lanjuti Nota Dinas Nomor: TU.04/85/SES.M.EKON/05/2026 perihal Hasil Evaluasi Keaktifan User Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5.	Melakukan revisi TOR/RAB	Terlaksana	Telah dilakukan revisi RAB di Kedeputan V yaitu melalui ND Nomor: • PR.04.01/247/D.V.M.EKO N.1/04/2026 tanggal 27 April 2026 • PR.04.01/278/D.V.M.EKO N.1/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 • PR.04.01/304/D.V.M.EKO N.1/06/2026 tanggal 24 Juni 2026
6.	Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP	Terlaksana	Telah ditindak lanjuti ND Penyampaian Kertas Kerja Penilaian Mandiri (PM) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Deputi V Tahun 2026 Telah disampaikan ND Penyampaian Counterpart SPIP D5

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya.

	Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut: 1. Dalam rangka akselerasi peningkatan nilai SAKIP masih ditemukan kendala dalam memenuhi target capaian kinerja kebijakan Deputy V dengan data sektoral dari kementerian/lembaga teknis terkait. 2. Sebagai kelanjutan dari kebijakan efisiensi anggaran di awal tahun, proses revisi TOR dan RAB pada TW II telah dilakukan. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Guna mengakselerasi peningkatan nilai SAKIP dan pemenuhan target capaian kinerja, Deputy V akan mengoptimalkan forum dialog kinerja. 2. Sebagai langkah korektif berkelanjutan, Sekretariat Deputy V akan melakukan optimalisasi dan monitoring dengan memanfaatkan rujukan dari Laporan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dan Evaluasi Aplikasi SRIKANDI.
--	--

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Tata kelola yang baik merupakan landasan penting bagi organisasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang diemban. Ketercapaian sasaran strategis ini akan secara signifikan mendorong terwujudnya pelaksanaan proses bisnis Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang berfokus pada koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan yang efektif. Dengan tata kelola yang baik, organisasi dapat mewujudkan birokrasi yang efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nilai keberhasilan Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dihitung berdasarkan seberapa banyak bukti dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bukti dukung yang telah dihasilkan dan kemudian dikalikan 100%. Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 adalah sebesar 100%. Implementasi tata kelola diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputian. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek
---	---

utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	50%	50%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW IV	Status	Keterangan
1.	Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata TW I	Terlaksana	Dalam rangka monitoring pelaksanaan rencana kinerja, telah dilakukan beberapa hal berikut: • Melaksanakan Rapat Persiapan Penyusunan Laporan Triwulan I Tahun 2026 pada tanggal 7 April

			2026 di Ruang Rapat Biro Umum I, Gedung Pos Ibukota Lt. 6. • Melaksanakan Diskusi Pembahasan Manual IKU dan Rencana Aksi Tahun 2026 pada tanggal 15 April 2026 di Ruang Rapat Biro Umum V, Gedung Pos Ibukota Lt. 5. • Menyampaikan nota dinas nomor AK.03/226/D.V.M. EKON.1/04/2026 tanggal 22 April 2022 perihal Permintaan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 kepada para Asdep.
	2.	Melakukan Penetapan SOP Layanan Deputi	Terlaksana Telah ditetapkan SOP Koordinasi Data/Informasi Tata Kelola di Lingkungan Deputi pada Triwulan I, dan telah dilaksanakan sosialisasi serta penyampaian SOP kepada unit keasdepan.
	3.	Koordinasi pelaksanaan AKIP Kedeputan, Reformasi Birokrasi Kedeputan, dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran Deputi V	Terlaksana Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas dalam penyusunan laporan kinerja sektor pariwisata, khususnya meningkatkan nilai SAKIP Deputi V, dilaksanakan Rapat Pembahasan Akselerasi Peningkatan Nilai

				SAKIP melalui Penguatan Akuntabilitas Laporan Kinerja dan Pemanfaatannya dalam Mendorong Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2026 pada tanggal 29 April 2026 di Yogyakarta. Sekretariat Deputy V mengusulkan 4 (empat) orang pegawai, termasuk Sekretaris Deputy, untuk masuk dalam Tim Percepatan Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Tahun 2026, khususnya Tim RB Kedeputan. Usulan tersebut disampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi nomor RB.02/177/D.V.M.E KON.1/04/2026 tanggal 2 April 2026 perihal Penyampaian Pengusulan Anggota Tim Percepatan Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2026. Dalam rangka penguatan pengendalian dan evaluasi kinerja anggaran, khususnya penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy V, telah
--	--	--	--	--

			disampaikan nota dinas nomor AK.03/219/D.V.M.E KON.1/04/2026 tanggal 20 April 2026 perihal Pelaporan Data Target/Proyeksi dan Realisasi Capaian Output Triwulan I TA 2026 kepada para Asdep agar dapat melengkapi data yang diperlukan. Setiap pengajuan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) di lingkungan Deputy V disampaikan melalui nota dinas resmi kepada Kepala Biro Manajemen dan Kerja Sama, dengan menguraikan keterkaitan antara revisi anggaran dengan pencapaian target kinerja setiap unit.
		4. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terlaksana Telah dilakukan diskusi terkait Pengisian LKE Penilaian Mandiri SPIP dengan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN pada tanggal 04 Juni 2026. Selain itu, telah disampaikan Kertas Kerja Penilaian Mandiri SPIP Deputy V Tahun 2026 ke Plt.

			Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama melalui nota dinas nomor PW.06.09/290/D.V. M.EKON.1/06/2026 tanggal 9 Juni 2026, yang memuat mapping indikator penilaian dan bukti dukungannya.
	5.	Pelaksanaan Survei Penyelenggaraan Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Terlaksana Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Semester I Tahun 2026 ke seluruh keasdepan di lingkup kedeputian V pada tanggal 18 Juni - 24 Juni 2026.
	6.	Optimalisasi Pemanfaatan Srikandi	Terlaksana Proses tata kelola persuratan dan penandatanganan naskah dinas oleh pimpinan juga sudah dilaksanakan secara berkala melalui SRIKANDI.
	7.	Pemutakhiran peta Jabatan Deputy V	Terlaksana Pemutakhiran Peta Jabatan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas perubahan data kepegawaian, termasuk adanya pegawai yang telah memperoleh kenaikan jenjang jabatan.
	Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Unit kerja Sekretariat Deputy melaksanakan efisiensi dengan melaksanakan rapat secara daring, optimalisasi penggunaan Srikandi untuk		

mengurangi penggunaan ATK, serta selektif dalam melakukan perjalanan dinas dalam dan luar kota.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pencapaian target kinerja masih menghadapi beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. Kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), mengingat tingkat keterisian formasi pegawai di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata masih kurang dari 50 persen dari kebutuhan organisasi. Kondisi tersebut mengakibatkan beban kerja yang tinggi bagi pegawai yang tersedia, sehingga pelaksanaan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan harus dilakukan dengan sumber daya yang terbatas.

Selain keterbatasan SDM, Deputy juga masih menghadapi keterbatasan fasilitas kerja, khususnya belum tersedianya ruang kerja yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara optimal. Kondisi ruang kerja yang terbatas berdampak pada kurang optimalnya penataan personel, pelaksanaan koordinasi internal, serta kenyamanan lingkungan kerja yang pada akhirnya dapat memengaruhi produktivitas pelaksanaan kegiatan.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, Deputy tetap berupaya menjaga pencapaian target kinerja melalui optimalisasi pemanfaatan SDM yang tersedia, penyesuaian pembagian tugas berdasarkan prioritas, penguatan koordinasi internal, serta pemanfaatan fasilitas kerja secara efektif agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sebagai upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah melakukan beberapa langkah perbaikan. Dalam rangka mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, telah diajukan usulan penambahan pegawai melalui mekanisme pengadaan ASN maupun redistribusi pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat keterisian formasi dan mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pekerjaan, Deputy juga telah mengusulkan perbaikan dan penambahan fasilitas kerja, khususnya penyediaan ruang kerja yang lebih memadai serta sarana pendukung lainnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman, tertata, dan kondusif bagi pelaksanaan koordinasi serta penyelesaian tugas.

Di sisi internal, Deputy telah melakukan penataan organisasi kerja melalui penyusunan pembagian tugas dan tanggung jawab yang lebih jelas, proporsional, dan terukur sesuai dengan beban kerja masing-masing pegawai. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

	pelaksanaan tugas, memperkuat koordinasi antarpegawai, serta memastikan pencapaian target kinerja tetap berjalan secara optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia.
--	---

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputan. Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen: 1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. 2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat akhir Februari. Adapun Permenpan Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja tingkat ketaatan pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar 100%. Target ini dihitung berdasarkan tingkat efektivitas yang diukur melalui dua aspek utama yaitu ketepatan waktu dan substansi dokumen telah sesuai standar. Pada Triwulan II Tahun 2025, tingkat efektivitas perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:
--	--

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	50%	50 %	100 %

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Hingga Triwulan II 2026, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah menghasilkan **5** dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun 2026. Adapun rincian dokumen, target, serta realisasi tercantum sebagai berikut:

Dokumen Perencanaan	Target	Realisasi TW IV
Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi	Januari 2026	Ditetapkan pada Januari 2026
TOR RAB TA 2026	Januari 2026	Ditetapkan Januari 2026
Sasaran Kinerja Target Pegawai (SKP)	Januari 2026	Ditetapkan pada Januari 2026
TOR RAB 2027	Juli 2026	Telah diusulkan Juni 2026

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud komitmen terhadap penguatan akuntabilitas kinerja, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Manual Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Rencana Aksi Tahun 2026 telah ditandatangani dalam kegiatan penandatanganan yang dilaksanakan secara serentak di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata sebagai bentuk komitmen bersama dalam

mendukung pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi secara terukur dan akuntabel.

2. Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai Target (SKP Target) Tahun 2026 telah ditetapkan oleh seluruh pegawai dan pimpinan unit kerja pada bulan Januari 2026 melalui platform ASN Digital Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dapat diakses melalui www.asndigital.bkn.go.id. Penetapan SKP tersebut merupakan implementasi manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan secara elektronik untuk memastikan keselarasan antara kinerja individu dengan sasaran strategis, target kinerja organisasi, serta mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
3. TOR dan RAB Tahun 2026 telah ditetapkan dan menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pengelolaan anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
4. Dokumen Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2027 telah selesai disusun dan telah disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS) sebagai bahan pembahasan dan tindak lanjut dalam proses perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses perencanaan telah dilakukan secara kontinyu dimana pada Triwulan II 2026, Kedeputian V telah mulai menyiapkan dokumen perencanaan untuk tahun 2027. Proses yang berkelanjutan ini menandakan bahwa pada tahun 2027, seluruh dokumen perencanaan diproyeksikan dapat diselesaikan sesuai target.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

No.	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Monitoring dan evaluasi realisasi Renaksi TW I	Terlaksana	Monitoring dan evaluasi realisasi Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan I telah dilaksanakan melalui penyusunan dan penyelesaian Laporan Kinerja Triwulan I. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengukur tingkat

			pencapaian target kinerja, mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta mengidentifikasi tindak lanjut yang diperlukan sebagai upaya peningkatan kinerja organisasi
	2.	Perencanaan pelaksanaan Renaksi TW II	Terlaksana Perencanaan Rencana Aksi (Renaksi) Triwulan II telah dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan manajemen kinerja organisasi. Renaksi disusun dengan mengacu pada target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026.
	3.	Penyusunan TOR/RAB 2027 (Dokumen dukung renja 2027)	Terlaksana Penyusunan Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2027 sebagai dokumen pendukung Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 telah dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Seluruh dokumen telah disusun dan disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama (MKKS) sebagai bahan dalam proses perencanaan program, kegiatan, dan penganggaran Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
	4.	Revisi POK TW II	Terlaksana Revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Triwulan II telah dilaksanakan untuk periode Maret sampai dengan Juni 2026 di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri,

			Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Revisi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk memastikan efektivitas pelaksanaan anggaran dan pencapaian target kinerja organisasi. Revisi POK di Kedeputian V yaitu melalui ND Nomor: • PR.04.01/247/D.V.M. EKON.1/04/2026 tanggal 27 April 2026 • PR.04.01/278/D.V.M. EKON.1/05/2026 tanggal 29 Mei 2026 • PR.04.01/304/D.V.M. EKON.1/06/2026 tanggal 24 Juni 2026
	5.	Pengisian Dokumen Pemantauan Manajemen Risiko Semester I	Terlaksana Pemantauan Manajemen Risiko Semester I telah dilaksanakan melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dilakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Mandiri beserta dokumen pendukung sebagai bahan penilaian atas implementasi manajemen risiko Semester I sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.025.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 25

	orang) untuk setiap kali rapat yang dilakukan secara daring. Selain itu laporan E-monev dibuat secara digital sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan/laporan sehingga anggaran untuk melakukan pencetakan bahan/laporan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebagai berikut: 1. Efisiensi anggaran di satu sisi dapat menghemat penggunaan anggaran secara signifikan namun disisi lain juga berakibat pada perubahan secara masif atas rencana kegiatan yang sudah disusun sebelum adanya kebijakan efisiensi anggaran. Akibatnya, unit kerja perlu menyesuaikan rencana kegiatan serta kebutuhan anggarannya. Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2026, upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Aktif melakukan koordinasi dengan Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kemenko Perekonomian dan Unit Kerja Eselon II di Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata dalam penyusunan Renstra, Renja, serta TOR dan RAB 2027.
--	--

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Persentase keberhasilan tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian penciptaan budaya kerja yang transparan dan akuntabel melalui pelaporan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang diberikan oleh unit pengampu. Nilai keberhasilan tingkat ketaatan pelaporan diperoleh berdasarkan perhitungan total laporan yang memenuhi standar ketaatan dibagi total laporan yang disusun dan kemudian dikalikan 100%: Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 sebesar 100%. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau
---	--

format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Pada Triwulan II Tahun 2026, tingkat ketaatan pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	50%	50%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

1.4 Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

	1.	Monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Triwulan I	Terlaksana	Nota Dinas Nomor: AK.03/226/D.V.M.EKON.1/04/2026 Perihal Permintaan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Penyampaian Nota Dinas Nomor: AK.02.02/265/D.V.EKON.1/05/2026 perihal Laporan Hasil Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) Deputi V
	2.	Pengelolaan Laporan Kinerja melalui EKON-GO	Terlaksana	Laporan Kinerja Triwulan telah disusun, diselesaikan, dan diunggah melalui aplikasi eKon Go sesuai dengan jadwal pelaporan yang ditetapkan. Pengunggahan dokumen tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan pelaporan kinerja serta mendukung proses monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja organisasi.
	3.	Penyusunan Penilaian Kinerja Pegawai TW I	Terlaksana	Penyampaian Nota Dinas Nomor: AK.03/226/D.V.M.EKON.1/04/2026 perihal Permintaan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2026 Telah

			diselenggarakan Rapat Pembahasan Akselerasi Peningkatan Nilai SAKIP melalui Penguatan Akuntabilitas Laporan Kinerja dan Pemanfaatannya dalam Mendorong Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2026 pada 29 April 2026
	4.	Pengisian e Monev TW II	Terlaksana Laporan e-Monev telah disusun dan diperbarui sesuai dengan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan. Selanjutnya, data dan informasi pelaksanaan program, realisasi kinerja, serta capaian yang dilaporkan telah diperbarui (<i>update</i>) melalui aplikasi e-Monev sebagai bentuk pemenuhan kewajiban pelaporan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program serta pencapaian target kinerja organisasi.
	5.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Anggaran TW II	Terlaksana ND Revisi POK Bulan Juni 2026
Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah telah menyusun format pelaporan kinerja yang akan diunggah pada TW II 2026.			

	Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan program dan kegiatan secara umum berjalan sesuai dengan rencana. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja, antara lain: 1. Masih terdapat proses penyempurnaan dan penyesuaian pada aplikasi/website pelaporan kinerja sehingga memerlukan penyesuaian dalam proses penginputan, pelaporan, dan pemantauan capaian kinerja. 2. Kebijakan efisiensi anggaran mengakibatkan adanya penyesuaian terhadap rencana kegiatan, alokasi anggaran, serta prioritas pelaksanaan program pada masing-masing unit kerja. Berdasarkan kendala tersebut serta hasil evaluasi atas capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan meliputi: 1. Melaksanakan dialog kinerja secara berkala pada tingkat Kedeputan, Keasdepan, dan Sekretariat Deputi dengan melibatkan lintas unit kerja guna memperkuat koordinasi, menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan, serta mempercepat proses adaptasi terhadap perubahan kebijakan dan sistem pelaporan. 2. Meningkatkan koordinasi dengan unit pengelola aplikasi pelaporan kinerja untuk memastikan proses pelaporan berjalan secara optimal serta mengantisipasi kendala teknis yang dapat memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan. 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran guna memastikan penyesuaian yang dilakukan sebagai dampak kebijakan efisiensi tetap mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif dan akuntabel.
--	--

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Latar Belakang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus kedeputan.
--	---

Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan dan Pariwisata pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang meliputi :

1. Pengembangan Industri Logam, Mesin Alat Transportasi, Elektronik dan Aneka
2. Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi dan Tekstil
3. Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan
4. Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Program Strategis
5. Pengembangan Pariwisata

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila apabila : (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputan; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase penyelesaian isu-isu strategis adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Isu – Isu Strategis yang diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$(\text{Total Isu – Isu Strategis yang Diselesaikan})/(\text{Total Isu Strategis yang ditetapkan}) \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy pada tahun 2025 sebesar 100%.

Sampai dengan laporan ini disusun, persentase penyelesaian isu strategis dinilai berdasarkan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh kedeputan V untuk mencapai target dalam RPJMN. Monitoring dilakukan terhadap kegiatan yang terkait dengan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, Kepesertaan Pekerja pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Capaian Pembangunan Proyek Strategis Nasional, dan Kunjungan Wisatawan Mancanegara. Hasil monitoring kemudian disampaikan kepada Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2025 sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis	Persentase (%)	50%	50%	100%

yang diberikan
oleh Deputi

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi

No.	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Pelaksanaan kegiatan relevan terkait isu strategis yang ditugaskan oleh Deputi TW II	Terlaksana	• Terlibat dalam Koordinasi Tindak Lanjut Aduan pada Kanal Debottlenecking Satgas P2SP • Terlibat dalam Koordinasi Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan Larangan Impor Barang yang Diproduksi dengan Forced Labor • Terlibat dalam Koordinasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)
2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelesaian Isu Strategis TW II	Terlaksana	• Rapat koordinasi Internal Deputi V yang membahas perkembangan dan isu industri, ketenagakerjaan,

			dan pariwisata secara berkala
--	--	--	-------------------------------

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah monitoring penyelesaian isu strategis yang ditangani pada setiap Keasdepan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Hal tersebut dilakukan untuk menghasilkan laporan monitoring yang lebih komprehensif secara berkala setiap bulan.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penggunaan zoom meeting untuk melaksanakan monitoring kegiatan di lingkup kedeputian V.. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Rapat Internal Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan adalah meningkatkan intensitas rapat untuk menindaklanjuti hasil monitoring.

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Pembangunan zona integritas merupakan salah satu agenda nasional untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan melayani. Bagi Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, keberhasilan implementasi zona integritas menjadi salah satu pendukung dalam mendukung tercapainya sasaran strategis, khususnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata. Persentase pembangunan zona integritas diukur melalui pemenuhan dokumen pendukung reformasi birokrasi yang sesuai standar, yang mencakup aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem SDM aparatur, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% penetapan target pada tahun 2026 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Pada Triwulan II Tahun 2026, Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata
--	--

telah terealisasi sebesar 50% dari target Tahun 2026 sebesar 75% dengan ringkasan sebagai berikut.

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata TW II	Persentase (%)	50%	50%	100%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	Telah dilaksanakan pada Workshop Penguatan Kapasitas dan Keimanan SDM Deputy V: "Akselerasi Analisis Data, Overview Sistematika Produk Kebijakan, dan Wawasan Jenjang Karir pada tanggal 11 Maret 2026 sesuai dengan Laporan Nota Dinas Nomor: KP.07.06/174/D.V.M.EKO N.1/03/202, tanggal 31

				Maret 2026
	2	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana	Dokumen PK, Manual IKU, dan Rencana Aksi telah ditandatangani oleh seluruh pimpinan unit kerja di Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada 11 Maret 2026
	3	Kegiatan Publikasi Maklumat Pelayanan	Terlaksana	Sosialisasi Maklumat Pelayanan telah dilaksanakan memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana informasi guna menunjang implementasi Zona Integritas.
	4	Sosialisasi dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.	Terlaksana	Sosialisasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Semester I Tahun 2026 tanggal 18, 23, dan 24 Juni 2026.
Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 merupakan kelanjutan dari program-program yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Melalui agenda Kegiatan Publikasi Maklumat Pelayanan dan Sosialisasi dan Pelaksanaan Survey Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy sekaligus menjadi dasar dalam				

	penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Upaya ini dirancang sebagai instrumen evaluasi yang digunakan untuk memperoleh masukan dan umpan balik dari pengguna layanan guna mengukur tingkat kepuasan atas layanan yang diberikan, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah perbaikan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, unit kerja Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata masih menghadapi sejumlah rintangan dalam upaya mencapai target pembangunan Zona Integritas. Hambatan utama yang teridentifikasi adalah munculnya kejenuhan pada pihak eksternal atau penerima layanan dalam menanggapi survei rutin yang dilakukan tiap bulan. Maka dari itu, sangat penting untuk menciptakan inovasi dalam metode pengambilan survei eksternal agar antusiasme serta tingkat keterlibatan responden tetap terjaga. Melalui implementasi strategi baru ini, diharapkan dapat terbangun suasana kerja yang lebih produktif, inklusif, dan menjunjung tinggi integritas. Hal ini bertujuan agar Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mampu meningkatkan performa sekaligus memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan secara lebih optimal.
--	---

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Latar Belakang Indikator kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Sekretaris Deputy kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, serta sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Nilai Indeks diperoleh berdasarkan nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu: A. Sangat Puas (4), rentang nilai 3.51 s.d 4 B. Puas (3), rentang nilai 3.01 s.d 3.50 C. Tidak Puas (2), rentang nilai 2.51 s.d 3.00 D. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2.50 Hasil Pengukuran Kinerja Target kinerja berupa indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata pada tahun 2026 dengan nilai 3 dari 4 yang berarti memuaskan.
---	---

Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu: (i) Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*); (ii) Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*); (iii) Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*); (iv) Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*); dan (v) Aspek Sikap dalam Layanan (*Empathy*). Seluruh aspek kepuasan tersebut dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu : (1) Sangat Tidak Puas, (2) Tidak Puas, (3) Puas, dan (4) Sangat Puas.

Pada Triwulan II Tahun 2026, nilai indeks kepuasan layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata yang diisi responden adalah 3,53 dari 4 atau mencapai 117% dari target Triwulan II Tahun 2026 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata	Persentase (%)	3 dari 4	3,53	117%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata			
No.	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan

1.	Koordinasi Pelayanan Kegiatan Deputi	Terlaksana	1. Rapat Internal/Brief Mingguan rutin dengan Plt. Deputi 2. Pendampingan kegiatan Deputi
	Koordinasi kegiatan ke sekretariat Deputi V	Terlaksana	1. Rapat Pembahasan Kebijakan Penajaman Anggaran TA 2026 tanggal 13 April 2026 2. Rapat Pembahasan Akselerasi Peningkatan Nilai SAKIP melalui Penguatan Akuntabilitas Laporan Kinerja dan Pemanfaatannya dalam Mendorong Nilai Tambah Sektor Pariwisata Tahun 2026 tanggal 29 April 2026 3. Entry Meeting Pengawasan Kearsipan Internal 2026 tanggal 3 Juni 2026 4. Rapat Sosialisasi PKEKPPP Tahun 2026 dan Bimbingan Teknis Aplikasi SKM Online 2026 tanggal 22 Juni 2026

3.	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Kepuasan Layanan Sekretaris Deputy Semester I	Terlaksana	Sosialisasi dan Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Semester I Tahun 2026 tanggal 18, 23, dan 24 Juni 2026.
----	--	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah melakukan *benchmarking* secara informal dengan unit kedeputian lain mengenai layanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi pada masing- masing unit kerja tersebut.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya memanfaatkan aplikasi *video conference* seperti zoom meeting sehingga dapat menghemat anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 2.025.000 (untuk 1x rapat dengan asumsi peserta sebanyak 25 orang) untuk 1x pelaksanaan rapat daring. Selain itu, survei dibuat dalam bentuk *google form* sebagai efisiensi, sehingga tidak diperlukan pencetakan bahan dan anggaran untuk melakukan pencetakan bahan dapat dialihkan sebagian ke akun lainnya.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, tidak ada kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Namun tetap disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai: Memastikan pelaksanaan survei layanan dapat terlaksana sesuai jadwal yang sudah direncanakan.

Jakarta, 10 Juli 2026
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Industri,
Ketenagakerjaan, dan Pariwisata



Nuryani Yunus